

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH  
TANGGA MISKIN DI KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN  
KETAPANG TAHUN 2013**  
**(Studi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Ketapang Nomor 6 Tahun  
2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin)**

Oleh:  
**MARDI RAHMADIAN**  
NIM. E42010023

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

*Email : [Mardi\\_pdlcrew@yahoo.com](mailto:Mardi_pdlcrew@yahoo.com)*

**Abstrak**

Dalam pelaksanaan program raskin di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, peneliti melihat beberapa fenomena yang ada diantaranya ialah tentang target sasaran penerima raskin yang tidak sesuai dengan indikator kinerja petunjuk teknis program tersebut serta jumlah beras raskin yang tidak sesuai dengan jumlah RTS-PM yang sudah terdata di Kecamatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluasi dengan paradigma kualitatif dengan menggunakan teori Implementasi kebijakan (George C. Edward III). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1. Kurangnya komunikasi yang dilakukan implementor. 2. Tidak ada tanggung jawab dari sumber daya manusia dalam pelaksanaan program raskin, juga tidak adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program raskin. 3. Kurangnya perhatian pihak BPS, kelurahan/desa dalam hal ini mengenai pendataan di dalam pelaksanaan program raskin di kecamatan Benua Kayong masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdata sebagai penerima raskin.

Kata-kata Kunci : Raskin, Rumah Tangga Miskin, Kecamatan Benua Kayong

**EVALUATION OF PROGRAM IMPLEMENTATION RICE FOR POOR  
HOUSEHOLDS IN SUB CONTINENT KAYONG KETAPANG IN 2013  
(Study On The Implementation Of Ketapang Decree Number 6 Of 2013 On Technical  
Guidelines Program Rice For The Poor)**

**Abstract**

Implementation of the program in the district Rice for Poor Households Continent Kayong Ketapang, researchers saw some of the phenomena of which is on target Rice for Poor Households recipients that do not correspond to the performance indicators technical guidelines. The program and the number of poor rice that does not match the number of target households beneficiaries have been recorded in the district. The method used in this research is the method of evaluation research with qualitative paradigm using the theory of policy implementation (George C. Edward III). The conclusion of this study is 1. Lack of communication is the implementor, 2. No responsibility of human resources in the implementation of the program Rice for Poor Households, also the absence of infrastructure in the implementation of Rice for Poor Households program. 3. Lack of attention of the BPS, the urban / rural in this case the data on the implementation of the program in the district Rice for Poor Households Continent Kayong still many poor people not recorded as Rice for Poor Households recipients.

*Keywords : Rice for Poor Households , poor households , Sub Continent Kayong*



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 masih belum berakhir begitu saja. Ini ditandai dengan masih tingginya tingkat inflasi setiap tahunnya. Sebagai bukti, harga bahan kebutuhan pokok masih sulit dikendalikan oleh pemerintah. Kondisi ini membuat beban ekonomi masyarakat miskin semakin bertambah dengan kegagalan pemerintah menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan lain sebagainya.

Tingginya beban ekonomi yang dialami masyarakat, khususnya masyarakat miskin membuat pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang dinamakan beras miskin (Raskin). Raskin ini diharapkan bisa membantu meringankan ekonomi masyarakat miskin dan menekan kenaikan harga. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin, menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahananpangan, pengembangan

ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi dibagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM). Disamping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam permasalahan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Untuk menanggapi program ini, Gubernur selaku kepala wilayah dan kepala daerah membuat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan Gubernur ini merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah provinsi dan diimplementasikan kepada seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat salah satunya Kabupaten

Ketapang. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 52 Tahun 2012, Bupati Ketapang membuat Peraturan Bupati nomor 6 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2013. Penyaluran raskin tahun 2013 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 tetap mengacu pada data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang telah direvisi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta. Untuk itu harus segera disosialisasikan agar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) mengetahui perubahan kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan program raskin di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, peneliti melihat beberapa fenomena yang ada diantaranya ialah tentang target sasaran penerima raskin yang tidak sesuai dengan indikator kinerja petunjuk teknis program tersebut serta jumlah beras raskin yang tidak sesuai dengan jumlah RTS-PM yang sudah terdata di Kecamatan. Target sasaran program ini ialah masyarakat miskin yang sudah terdata di Kelurahan/Desa. Pada kenyataannya masyarakat miskin tidak mendapatkan Raskin, sebaliknya justru masyarakat yang

tergolong mampu yang mendapatkan raskin. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa tujuan dari program raskin ini belum tercapai. Tujuan program raskin ini ialah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Jika tujuan program ini belum tercapai, maka tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kecamatan Benua Kayong tidak akan naik setiap tahunnya. Hal ini sangat berlawanan dengan visi dan misi Kantor Camat Benua Kayong yang salah satu visi dan misinya ialah untuk mensejahterakan masyarakat.

**Table 1**

Perbandingan RTS-PM Mei 2012 dengan RTS-PM Februari 2013 Per/Desa/Kelurahan Se Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang

No	Kelurahan/Desa	Jumlah		
		RTS-PM Mei 2012	RTS-PM Februari 2013	Selisih
1	Kel. Kauman	106	103	3
2	Kel. Banjar	17	16	1
3	Kel. Tuan-Tuan	214	207	7
4	Kel. MuliaKerta	425	412	13
5	Desa Sei. Kinjil	141	138	3
6	Desa Baru	96	93	3
7	Desa Suka Baru	146	141	5
8	Desa Padang	217	210	7
9	Desa Mekar Sari	160	155	5

10	DesaNegeriBaru	148	143	5
11	DesaKinjilPesisir	85	82	3
	Jumlah	175 5	1700	55

*Sumber data :Kecamatan Benua Kayong  
Kabupaten Ketapang tahun 2013*

Berdasarkan tabel di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut, untuk itu peneliti mengadakan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Tahun 2013 (Studi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Ketapang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin)”.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah apakah proses pelaksanaan dari Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau sudah sesuai dengan perencanaan program yang sudah ditetapkan?

## 3. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tentu mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya dengan penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.

## 4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan mengenai evaluasi pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan termasuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses implementasi suatu program.

### b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang bermanfaat tentang hasil implementasi suatu kebijakan publik khususnya pada

evaluasi pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin.

## **B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI**

### **1. Kerangka Teori**

Model implementasi lainnya dikemukakan oleh George C. Edwards III (dalam Winarno 178-205:2012) yang menjelaskan tentang empat variabel yang mempengaruhi tercapainya atau tidak hasil suatu kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi : Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang tanggungjawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Arahan untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan kepada pribadi yang tepat, dan kebijakan ini mesti akurat dan konsisten. Jika para pembuat keputusan kebijakan ini berkehendak untuk melihat yang diimplementasikan tidak jelas bagaiman rinciannya maka kemungkinan akan timbul kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.

2. Sumber Daya.: Persoalan yang jelas dalam implementasi ini bukanlah tentang masalah betapa akuratnya arahanyang diberikan kepada pribadi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan semua kebijakan ini, melainkan kurangnya sumberdaya untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif maka implementasi tidak akan efektif juga. Sumberdaya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi.

3. Disposisi : sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Cara dimana implementor ini melakukan seleksinya, bagaimanapun juga bergantung sebagian besar pada disposisinya terhadap kebijakan. Sikap-sikapnya pada gilirannya akan dipengaruhi oleh berbagai pandangannya terhadap kebijakan masing-masing dan dengan cara apa mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasional pribadinya.

4. Struktur birokrasi : Jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan ini ada dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin dikerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Sebagaimana unit-unit organisasional menyelenggarakan kebijakan dengan standar operating procedure (SOP).

Penelitian ini berfokus pada hasil Program Raskin, jadi peneliti menggunakan teori implementasi oleh Edward III karena empat indikator teorinya menentukan tercapai atau tidaknya hasil suatu program.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluasi dengan paradigma kualitatif yang mengandung fokus pada penelusuran di tempat alamiahnya, bergantung pada peneliti yang bertindak sebagai instrument penjaring data, dan laporannya berbentuk narasi bukan angka. Pendekatan evaluasi program kualitatif sangat mengandalkan pengumpulan data secara empiris dan analisis terhadap informasi yang terdokumentasi secara sistematis. Paradigma kualitatif lebih sesuai

untuk melakukan evaluasi pada saat program berlangsung. Peneliti dapat memahami hal yang berkaitan dengan program dengan melihat secara langsung pada saat program berjalan. Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan yang akurat, peneliti melakukan penelitian secara intensif dengan terjun langsung ke lapangan agar dapat menganalisa permasalahan dan mengevaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Tahun 2013. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan alat bantu pedoman wawancara, panduan observasi dan tape recorder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis domain. Analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau ditingkat permukaan, namun relative utuh tentang objek penelitian tersebut. Teknik analisis ini memiliki target untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari subjek yang diteliti, tanpa harus dirinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan subjek penelitian tersebut.

Selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi teknik yaitu

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2011: 330). Pengecekan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan observasi, kemudian dicek dengan dokumentasi. Jika terdapat ketidakcocokan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti akan melakukan wawancara ulang kepada informan yang sudah ditentukan sampai memperoleh data yang jenuh.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dari hasil penelitian mengenai faktor komunikasi pada implementasi program raskin yang ada di Kecamatan Benua Kayong diketahui bahwa proses implementasi kebijakan raskin kurang

melakukan sosialisasi kebijakan baik secara formal maupun informal. Sosialisasi yang terjadi tidak efektif jika dikaitkan dengan waktu sosialisasi yang jarang dilakukan oleh implementor. Adapun sosialisasi yang dilakukan hanya kepada Lurah, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan Satgas yang diberikan informasi tentang raskin secara langsung dari pihak kecamatan. Apabila sosialisasi yang dilakukan secara informal yang digunakan tidak didukung dengan sosialisasi formal maka sosialisasi yang dilakukan tidak dapat menyampaikan maksud dan tujuan kebijakana secara utuh bahkan dapat memunculkan persepsi berbeda-beda di antara penerima informasi.

#### **2. Sumber Daya**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam pelaksanaan suatu program. Edward III dalam Widodo (2011: 98) menyatakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka pelaksanaan suatu program tersebut tidak akan efektif

juga. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dapat dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki pegawai kantor Camat Benua Kayong dalam pelaksanaan program raskin ini masih belum baik, karena masyarakat tidak ada yang merasakan secara langsung tentang pelayanan raskin. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program raskin ini yang berkaitan dengan sumber daya sarana dan prasarana. Pihak kecamatan tidak ada memberikan fasilitas dalam pelaksanaan program raskin ini. Mereka hanya mempercayai kepada satgas secara seutuhnya tanpa memberikan perhatian secara lebih tentang bagaimana kondisi tempat untuk menyimpan beras serta kualitas beras yang ada karena dari pihak kecamatan tidak ada mengecek secara langsung kualitas berasnya, hanya saja mengurus tentang administrasi pelaksanaan program raskin ini.

### **3. Disposisi**

Menurut Edward III dalam Winarno (2005: 142-143) mengemukakan bahwa kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dalam pelaksanaan program raskin di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang

sepertinya tidak mendapat keseriusan dan tanggung jawab lebih dari pihak kecamatan yang mengurus program raskin ini. Dari pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa disposisi dari pelaksana kebijakan ini belum optimal karena pihak kecamatan yang seharusnya mengurus langsung pelaksanaan program raskin ini sepertinya kurang bersungguh-sungguh atau kurang bertanggung jawab. Pihak kecamatan sepertinya lepas tangan dan memberikan wewenang penuh kepada satgas untuk memberikan pelayanan dalam pelaksanaan program raskin ini. Ini dikarenakan alasan pihak kecamatan yang beranggapan tidak hanya program raskin ini yang di urus tetapi juga masih banyak program lain yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan Benua Kayong.

### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek yang pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Dalam pelaksanaan program

raskin di Kecamatan Benua kayong Kabupaten Ketapang sepertinya belum sesuai dengan SOP yang ada karena masih adanya masalah-masalah dalam pendataan.

#### **D. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN**

##### **a) Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari pembahasan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan program raskin di kecamatan Benua Kayong belum optimal, adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu :

##### **1. Komunikasi**

Dalam pelaksanaan program raskin di kecamatan Benua Kayong masih mengalami kurangnya komunikasi yang dilakukan implementor. Jika dilihat dari dimensi transformasi, kebijakan yang disampaikan kesemua pihak yang berkepentingan informasi belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan masyarakat yang sebagian besar menyatakan masih kurang sosialisasi mengenai raskin. Proses komunikasi

yang sangat minim antara pihak kecamatan yang mengurus program raskin ini dengan pihak masyarakat miskin yang menerima raskin membuat pelaksanaan program ini jadi belum optimal.

##### **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu program. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dalam pelaksanaan suatu program. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka tidak menuntut kemungkinan sumber daya pendukung lainnya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dalam upaya pencapaian tujuan dari kebijakan publik. Sumber daya manusia yang ada di kecamatan Benua Kayong dalam pelaksanaan program raskin ini sudah cukup baik, dilihat dari pegawai kecamatan, pihak kelurahan/desa, dan satgas. Kuantitas dari implementor juga sudah cukup dalam pelaksanaan program ini. Tetapi hambatan yang masih ada ialah kualitas pelayanan

secara langsung dari pihak kecamatan yang sepertinya lepas tangan dalam pelaksanaan program ini. Pihak kecamatan melimpahkan langsung kepada satgas dalam pembagian secara langsung dan penyimpanan raskin. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tanggung jawab dari sumber daya manusia dalam pelaksanaan program raskin, juga tidak adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program raskin. Sepertinya hanya membebaskan kepada satu pihak yaitu satgas karena apapun yang terjadi dilapangan baik kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan semua ditanggung satgas, salah satunya ialah dalam hal kuota beras yang kurang.

### **3. Disposisi**

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka pelaksanaan suatu program tidak akan terlaksana dengan baik. Kurangnya perhatian pihak BPS, kelurahan/desa dalam hal ini mengenai pendataan di dalam pelaksanaan program raskin di

kecamatan Benua Kayong masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdata sebagai penerima raskin. Ini merupakan anggapan masyarakat miskin yang lain yang tidak mendapatkan raskin, padahal ini adalah upaya dari satgas untuk menutupi kekurangan kuota dan untuk membagikan raskin kepada masyarakat miskin yang belum terdata walaupun belum semua terpenuhi.

### **4. Struktur Organisasi**

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Prosedur yang panjang dan kompleks ini tentunya memerlukan sumber daya yang memadai serta waktu yang relatif lama dalam melewati tahap-tahap tersebut. Selain itu kendalalain juga dari implementasi penyebaran kewenangan yang tidak jelas bagi pelaksana program raskin di kecamatan Benua Kayong.

#### **b) Keterbatasan**

Dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa kendala yang dirasakan peneliti sehingga menimbulkan kesulitan dalam

pelaksanaan penelitian. Keterbatasan yang dialami peneliti dalam pelaksanaan penelitian yaitu :

1. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pikiran-pikiran ke bentuk tulisan.
2. Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan penelitian dengan tema "Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang" masih dirasakan banyak kekurangan dan kelemahan karena peneliti sendiri masih tergolong baru untuk melakukan penelitian ilmiah. Kelemahan tersebut khususnya pada keterbatasan dalam melakukan wawancara, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

#### c) Apresiasi

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak dan Ibu Dosen, Pengelola, Pengasuh, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya

di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang yang telah mengizinkan serta membantu memberikan informasi dan data dalam proses penelitian.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku:

- Islamy, M.I. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soenarko, Sd. (2000). *Publik Policy Pengertian Pokok untuk memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University.
- Winarno, B. (2005). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Siagian, S.P. (1987). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Jones, C.O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Casley, K. (1991). *Monitoring and Evaluation*. Washington DC: IBRD
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, A.G. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, J. (2011). *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MARDI RAHMADIAN  
NIM / Periode lulus : E42010023 / 2015  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU PEMERINTAHAN  
Email address/HP : [Mardi\\_pdlerew@yahoo.com](mailto:Mardi_pdlerew@yahoo.com) / 085245826338

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA  
MISKIN DI KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

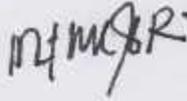
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal.....

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2015



  
Dr. H. Wijaya Kusuma, MA  
NIP. 196202141986031001

  
(MARDI RAHMADIAN)